BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Woll (Sawir 2021), kebijakan publik merupakan suatu kegiatan pemerintah yang dilakukan untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang berkaitan dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian lain juga diberikan oleh Anggara 2014 dalam Dewi 2022, kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh lembaga maupun pejabat pemerintah untuk melanjutkan suatu tindakan agar dapat mencapai prioritas dan masalah penting yang dialami oleh masyarakat.

Kebijakan publik selalu memuat setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Dari dua pandangan para ahli terkait pengertian kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah dalam mengambil keputusan untuk memecahkan permasalahan di masyarakat melalui bidang-bidang yang terkait sehingga bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan.

b. Aktor Kebijakan Publik

Dalam proses kebijakan publik, terdapat beberapa aktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Muadi, Ismail & Sofwani (2016) dalam Iriawan 2024 menyebutkan bahwa aktor kebijakan dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu:

1) Aktor Negara

Aktor negara adalah aktor utama pada proses kebijakan publik yang meliputi lembaga-lembaga pemerintahan di berbagai tingkat, mulai dari pusat sampai daerah. Lembaga ini meliputi eksekutif, legislative, birokrasi dan yudikatif. Aktor ini memiliki kekuasaan sah dalam merumuskan, mengesahkan dan mengimplementasikan kebijakan publik.

2) Aktor Non-Negara

Aktor non negara umumnya berupa individu atau organisasi yang berasal dari Masyarakat sipil, sektor swasta, atau akademisi yang terlibat dalam diskusi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.

c. Proses dan Tahap Kebijakan

Proses dan tahapan kebijakan publik menjadi salah satu yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan di berbagai bidang yang dialami oleh Masyarakat. Menurut Dunn dalam Alhasni et al. 2024, membagi tahapan kebijakan publik menjadi:

1) Tahapan Penyusunan Agenda

Para pejabat negara yang terpilih akan memperhatikan dan memilih isu-isu publik yang masuk dalam agenda publik lalu memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan.

2) Tahap Formulasi Kebijakan

Tahap ini adalah proses diskusi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dengan mengidentifikasi permasalahan dalam agenda kebijakan lalu dicarikan alternatif solusinya.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Tahap ini merupakan bagian pemilihan alternatif kebijakan dari para perumus kebijakan yang akan diambil dengan meminta dukungan dari aktor kebijakan atau pengambil keputusan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi selanjutnya akan diimplementasikan oleh lembaga pemerintahan ataupun badan pelaksana kebijakan dengan menggerakkan dana dan sumber daya yang telah disediakan. Pada tahap ini monitoring juga akan dilaksanakan sejalan dengan implementasi kebijakan.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahap akhir dari kebijakan publik adalah evaluasi, dimana tahap ini menjadi tahap penilaian kebijakan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berjalan dan mampukah kebijakan tersebut mengatasi permasalahan yang ada.

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Kaendung et al. 2021), implementasi kebijakan merupakan tindakan penerapan solusi yang dijalankan oleh lembaga, pejabat pemerintahan bahkan pihak swasta berdasarkan hasil keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Carl Friedrich dalam (Kaendung et al. 2021), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu program yang dilakukan oleh aktor kebijakan, lembaga pemerintah maupun swasta berdasarkan kendala yang dialami oleh masyarakat dengan memperhatikan alternatif solusi yang sesuai dan tidak merugikan.

Implementasi kebijakan memiliki proses yang rumit karena menghasilkan keluaran dengan memperhatikan tolak ukur keberhasilan suatu program. Dimana upaya tersebut membutuhkan kerja sama dan koordinasi antar pembuat dan pelaksana kebijakan agar dapat sejalan dan sesuai tujuan.

Implementasi kebijakan menjadi tahap penting dalam proses kebijakan, karena tahap ini memperhatikan keberhasilan program apakah sesuai dengan tujuan dan memiliki dampak bagi masyarakat.

b. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Dalam studi implementasi terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan implementasi, yaitu pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Dalam pendekatan *top-down*, studi implementasi menggunakan logika berpikir dari atas, kemudian melakukan penelaahan ke bawah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sebuah kebijakan.

Pendekatan ini juga sering disebut dengan "*policy centered*", karena fokus perhatian peneliti hanya diarahkan kepada kebijakan dan berusaha untuk mendapatkan fakta-fakta apakah kebijakan itu, saat diimplementasikan dapat mencapai tujuan atau tidak (Kasmad 2018). Dalam bahasa Barrett, tujuan utama pendekatan *top-down* adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masalah dalam pelaksanaan kebijakan atau ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan.

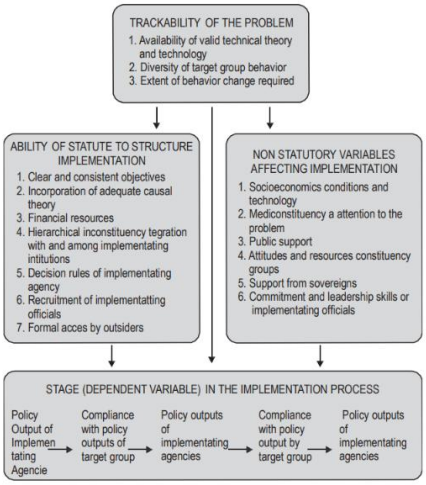
c. Model Implementasi Kebijakan

1) Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

   Model Mazmanian dan Sabatier disebut dengan model kerangka analisis implementasi. Proses implementasi meliputi tiga variabel.

a) Pertama, variabel independen, yaitu sejauh mana masalah dapat dikendalikan, berkaitan dengan indikator teori dan teknis pelaksanaan, variasi objek, serta perubahan yang diharapkan.
b) Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan dalam Menyusun proses pelaksanaan dengan indikator kejelasan dan konsisten sasaran, penerapan teori kausal, keakuratan pengalokasian dana, integrasi hirarki antar lembaga pelaksana, peraturan pelaksana dari institusi terkait, pemilihan pejabat pelaksana, serta transparansi terhadap pihak luar, ditambah variabel eksternal yang mempengaruhi proses implementasi terkait dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi,dukungan Masyarakat, sikap konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
c) Ketiga, variabel dependen, yaitu langkah-langkah dalam proses pelaksanaan dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga atau badan yang melaksanakan dalam bentuk penyusunan kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil konkret, penerimaan terhadap hasil konkret tersebut, dan akhirnya mengarah pada perbaikan atas kebijakan yang disusun dan dilaksanakan itu atau keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Gambar 1
Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

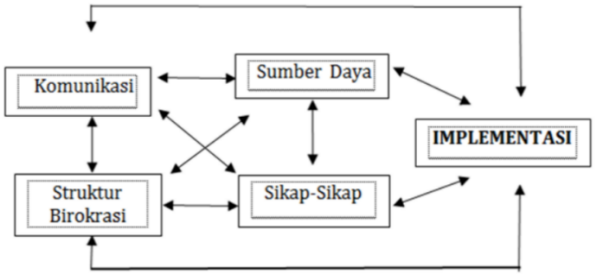


Sumber: Handoyono, 2012

2) Model Implementasi Kebijakan Edward III

George Edward III menekankan bahwa tantangan utama dalam administrasi publik adalah minimnya fokus pada isu pelaksanaan kebijakan (Nugroho 2009). Menurut Edward, tanpa implementasi kebijakan yang tepat, maka keputusan para pembuat kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, Edward (dalam Nugroho 2009) merekomendasikan empat isu utama yang perlu diperhatikan, yaitu komunikasi (communication), model George Edward III dapat dicermati pada gambar berikut:

Gambar 2
Model Implementasi Kebijakan George Edwards III



Sumber: Siregar, 2022

a) Komunikasi (*communication*) berhubungan dengan cara penyampaian kebijakan kepada organisasi atau publik, aksesibilitas sumber daya kebijakan, sikap dan respons dari pihak yang terlibat serta bagaimana struktur organisasi melaksanakan kebijakan.
b) Sumber daya (*resources*) terkait dengan ketersediaan sumber daya yang mendukung, terutama sumber daya manusia. Aspek sumber daya yang krusial dalam konteks ini adalah kemampuan pelaksana kebijakan yang menerapkan kebijakan dengan efektif.
c) Komitmen (Disposition) terkait dengan kesiapan dan komitmen dari para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.
d) Struktur birokrasi (bureaucratic structure) merujuk pada kesesuaian organisasi birokrasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik. Dalam konteks ini, yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk mencegah terjadinya bureaucratic fragmentation, karena struktur semacam itu dapat menghalangi pelaksanaan kebijakan publik.

3) Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Model implementasi ini memperhatikan dua hal, yaitu:

a) Dari segi proses, dengan mengajukan pertanyaan apakah implementasi kebijakan sejalan dengan yang direncanakan dengan mengacu pada Tindakan kebijakannya.

b) Apakah tujuan kebijakan tercapai dimensi ini dinilai berdasarkan dua aspek, yaitu:

(1) Impact atau dampaknya terhadap masyarakat secara individual dan kelompok.

(2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Sebagai penjelasan lebih lanjut, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan, yang meliputi: isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*) yang berkaitan dengan perumusan kebijakan.

Isi kebijakan (*content of policy*) yang mempengaruhi proses implementasi adalah:

(1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*interests affected*)

hal ini berhubungan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dasar pemikirannya yaitu bahwa setiap kebijakan saat dilaksanakan pasti akan melibatkan berbagai kepentingan.

(2) Tipe manfaat (*type of benefits*) dari suatu kebijakan perlu mencakup beberapa jenis manfaat yang menggambarkan efek

positif yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan yang rencananya akan dilaksanakan. Manfaat yang dirasakan tersebut bisa terbagi maupun tidak terbagi, dalam jangka pendek maupun jangka panjang

(3) Derajat perubahan yang ingin dicapai (*extent of change envisioned*) mengacu pada seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan, perlu adanya skala yang jelas untuk pencapaiannya.

(4) Letak pengambilan keputusan (*site of decision making*) dalam suatu kebijakan memiliki peran krusial dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, perlu dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan dilaksanakan.

(5) Pelaksana program (*program implementors*) harus sudah terdata pelaksana kebijakan yang kompeten dan mampu untuk melaksanakan suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan publik, organisasi (birokrasi) publik yang menjadi pelaksana utama, kinerjanya secara internal akan ditentukan oleh kemampuan organisasi yang dimilikinya.

(6) Sumber daya yang digunakan (*resources committed*) oleh pelaksana kebijakan harus didukung oleh sumber- daya yang cukup agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan baik. Sumber daya (*resource*) berhubungan dengan aset yang harus dimiliki organisasi, baik berupa bahan dasar (*raw material*) yang dipakai untuk memproduksi barang atau jasa, maupun aset yang terdiri dari tenaga kerja, dana, kemampuan manajerial, keterampilan, dan kemampuan fungsional.

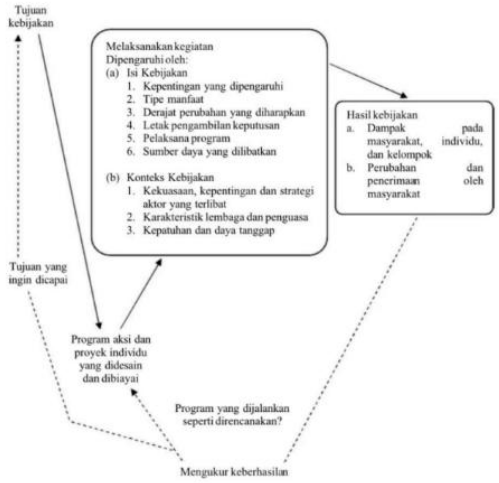
Lingkungan Implementasi (*context of implementation*), meliputi:

(1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interests, and strategies of actors involved*) dalam sebuah juga harus diperhitungkan kekuatan dan wewenang, kepentingan dan strategi yang diterapkan oleh aktor yang berpartisipasi untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan tersebut. Apabila aspek ini tidak dipertimbangkan, kemungkinan besar kebijakan akan tidak berjalan sesuai rencana.

(2) Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa (*institution and regim characteristics*) lingkungan kebijakan dilaksanakan turut mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami ciri-ciri lembaga dan rezim yang berkuasa yang akan mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan.

(3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*compliance and responsiveness*) berarti, sejauh mana pelaksana mematuhi dan merespon kebijakan yang sedang diimplementasikan. Setelah penerapan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi dan konteks, diharapkan juga dapat teridentifikasi apakah kebijakan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga level perubahan yang diinginkan dapat terjadi.

Gambar 3
Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle



Sumber: Fajarwati and Rahmadila, 2022

4) Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model ini mengendalikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik (Siregar 2022).

a) Standar dan tujuan kebijakan

Indikator keberhasilan dan tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pelaksana kebijakan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan sehingga menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

b) Sumber daya kebijakan

Sumber daya pendukung pelaksana kebijakan dapat berupa dana, materi, manusia dan insentif dari berbagai sumber yang bisa melancarkan pelaksanaan kebijakan.

c) Komunikasi antar organisasi

Terdapat faktor pendukung yaitu komunikasi antar organisasi dan aktivitas-aktivitas penguatan dari berbagai pihak tentang apa yang menjadi standar dan tujuan dari kebijakan.

d) Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana terdiri dari organisasi formal dan informal yang berkaitan dengan pengimplementasian kebijakan. Hal tersebut dilihat dari ciri pelaksana kebijakan yang menjalankan kebijakan dengan ketat dan disiplin.

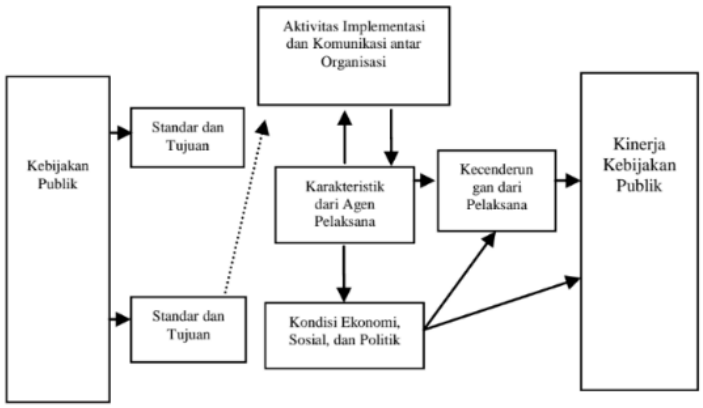
e) Sikap para pelaksana

Faktor ini adalah tahap pemilihan kebijakan dari para implementor, dengan memperhatikan tiga elemen yaitu; pengetahuan *(cognition)*, pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, respon kebijakan yang menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan intensitas pada kebijakan.

f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah faktor pendukung yang perlu diperhatikan karena kelompok sasaran dari suatu kebijakan berkaitan dengan kondisi sosial. Begitu juga dengan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, baik pada formulasi kebijakan sampai dengan implementasi kebijakan.

Gambar 4
Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber: Ibrahim, 2018

d. Kebijakan Pencegahan Penggunaan Rokok pada Remaja

Dalam upaya pencegahan penggunaan rokok pada remaja pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Peraturan ini memuat tentang larangan penggunaan/penjualan rokok kepada anak dibawah 21 tahun dan larangan penjualan secara eceran/per batang (Kemenkes 2024).

1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

(a) Mengatur dan menyelenggarakan pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik, pada level daerah dengan mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah;

(b) Menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi mengenai pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik di wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

(c) Menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok di wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

(d) Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan;

(e) Melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi produk tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan dan melindungi kelestarian tanaman tembakau;

(f) Melakukan advokasi dan kerja sama lintas program/sektor dan masyarakat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

(g) Mendorong partisipasi dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat untuk pengendalian konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik di wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan

(h) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kawasan tanpa rokok dan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik.

Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga telah mengeluarkan regulasi untuk membantu membatasi ruang perokok dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

e. Rokok Pada Remaja

Masa remaja adalah menjadi tahap terpenting dalam kehidupan seseorang karena fase inilah fisik maupun mental sedang tumbuh dan berkembang. Fase remaja menjadi sangat rentan terhadap pengaruh buruk, termasuk perilaku merokok (Fadhila et al. 2022). Remaja sering mengalami perubahan pola berpikir, emosional, serta mengungkapkan penerimaan lingkungan melalui perilakunya. Berdasarkan usia, masa remaja digolongkan menjadi tiga tahap yaitu remaja awal usia 10-13 tahun, remaja tengah usia 14-17 tahun, dan remaja akhir usia 18-21 tahun

(Ragita and Fardana N. 2021). Saat ini industri tembakau menjadikan remaja target utama karena kecenderungan masa perkembangan yang mudah terpengaruhi menjadi peluang bagi mereka. Dimana jika kebiasaan merokok dimulai sejak remaja, maka dampaknya bisa sangat berbahaya dan berlangsung dalam jangka panjang.

Rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan sekitar 70 karsinogen, seperti formaldehida, benzena dan nitrosamin yang secara langsung meningkatkan risiko kanker dan penyakit kronis lainnya. Dampak zat kimia tersebut bagi remaja yaitu dapat mengganggu perkembangan otak dan lebih mudah kecanduan karena otak masih dalam tahap perkembangan. Dalam jangka panjang, remaja yang cenderung menggunakan rokok akan mudah mengalami gangguan kecemasan dan kesulitan untuk berkonsentrasi di sekolah. Bahkan, merokok di usia muda akan meningkatkan risiko untuk mencoba narkoba atau minuman keras di kemudian hari (Fikri et al. 2024).

Di Indonesia peningkatan jumlah penggunaan rokok telah menjadi isu kesehatan yang penting. Menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, Berdasarkan data proporsi pengguna rokok di kalangan usia 15-19 tahun menjadi kelompok terbanyak mencapai 56,5%, diikuti oleh kelompok usia 10-14 tahun sebanyak 18,4% (Kemenkes 2024a). Salah satu penyebab banyaknya perokok dibawah umur, dikarenakan akses rokok yang masih sangat mudah didapatkan di warung-warung dan dijual dengan harga murah, bahkan bisa dibeli satuan (Wahyuti 2024).

B. Tinjauan Pustaka Terkait Karya

1. Pengertian *Policy Brief*

Policy Brief adalah dokumen yang berisi rangkuman singkat terkait masalah kebijakan yang telah dikaji melalui data yang diperoleh, lalu data tersebut diolah dan dianalisis agar menghasilkan saran atau rekomendasi penyelesaian masalah untuk digunakan oleh pembuat kebijakan atau pemangku kepentingan lainnya (Zunaidi 2024).

Policy Brief menurut Young and Quinn (2002), *Policy Brief is a document that outlines the rationale for choosing a particular policy alternative or course of action in a current policy debate* (dokumen ringkas yang membahas terkait masalah tertentu yang membutuhkan perhatian para pengambil keputusan untuk mempertimbangkan alternatif kebijakan yang telah direkomendasikan.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia No 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulisan Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan, terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah *Policy Brief* yaitu:

a. Fokuskan pada satu masalah kebijakan;
b. Jelaskan tujuan;
c. Identifikasi fakta formal yang mendukung tujuan;
d. Argumentasikan dalam narasi yang mudah dipahami;
e. Susun rekomendasi yang dapat digunakan (accessible) oleh target pembaca atau audiens; dan
f. Batasi tulisan kurang lebih 1500 kata, dengan jumlah halaman 2 sampai dengan 4 halaman (maksimal 8 halaman).

2. Tujuan dan Fungsi *Policy Brief*

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia No 28 tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulisan Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan, *Policy Brief* memiliki 2 (dua) tujuan utama yaitu sebagai media untuk eksplorasi dan advokasi. *Policy Brief* sebagai media untuk eksplorasi tidak hanya memberikan sebuah rekomendasi terpilih namun *Policy Brief* juga sebagai media advokasi memberikan pilihan terhadap sebuah solusi tertentu.

Policy Brief disusun guna mendukung pembuat kebijakan (pembuat keputusan) dengan berdasar informasi yang relevan (*informed evidence-based*) dan ditujukan pada organisasi-organisasi yang relevan (yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan/membuat Keputusan). *Policy Brief* disusun bagi pembaca yang memiliki waktu terbatas untuk mengambil keputusan-keputusan, sehingga kemasannya pun dibuat seringkas mungkin tanpa mengurangi esensi dari tujuan penyusunan tersebut. Dengan menggunakan *Policy Brief* penulis berupaya menjelaskan dan menyakinkan urgensi isu terkait, menyajikan rekomendasi kebijakan, dan juga memberikan bukti yang mendukung rekomendasi tersebut.

3. Komponen Penyusunan *Policy Brief*

Policy Brief digunakan untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan, sehingga penyusunannya sangat memperhatikan kualitasnya. Kualitas *Policy Brief* dapat dilihat dari beberapa komponennya, antara lain:

a. Berisi latar belakang yang jelas dan cukup, sehingga pembaca dapat memahami konteks permasalahan dan substansi permasalahan secara tepat;

b. Meningkatkan keyakinan pembaca bahwa masalah publik tersebut harus segera diatasi;

c. Memberikan alternatif pilihan-pilihan kebijakan dan kemungkinan dampak dari pilihan-pilihan tersebut;

d. Memberikan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung pilihan kebijakan;

e. Mendorong pembaca dari kalangan pengambil keputusan untuk bersemangat mengambil dan menetapkan keputusan.

4. Sistematika Penyusunan Policy Brief

Penyusunan terkait *Policy Brief* dikemukakan oleh Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, diantaranya:

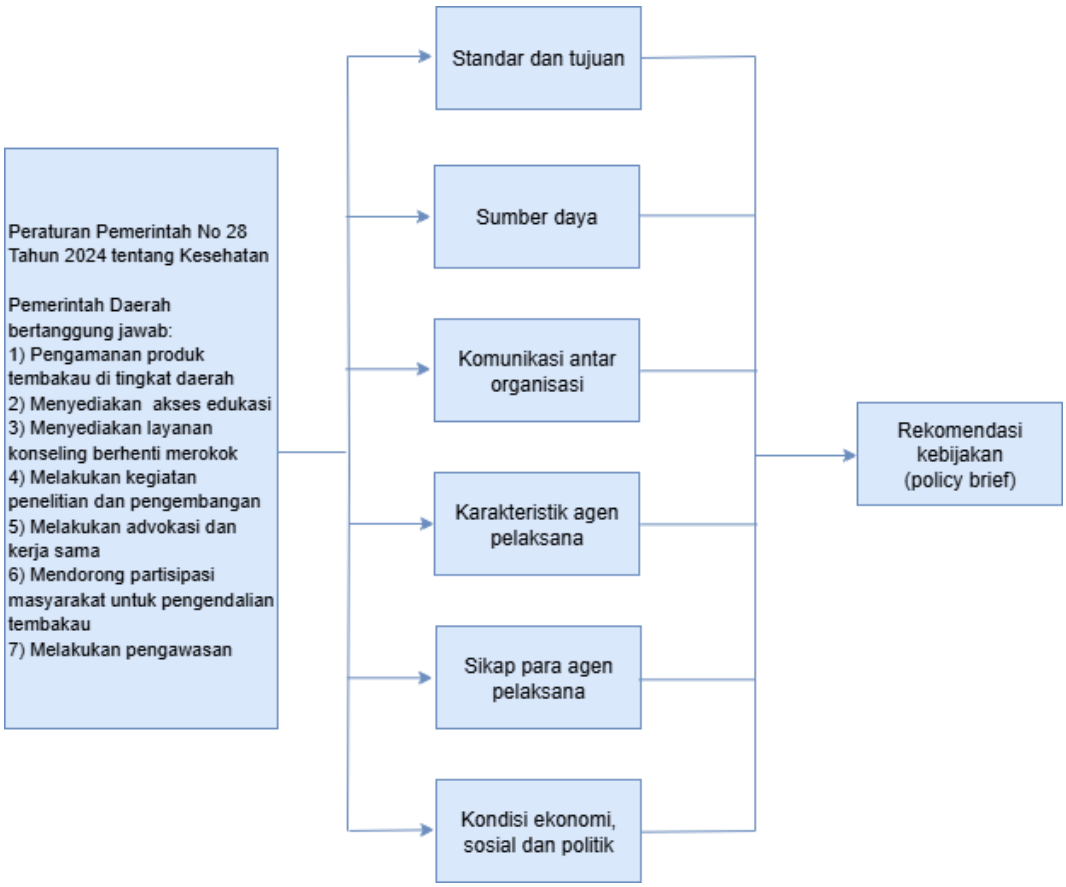
a. Judul, sebaiknya
   (a) Menarik sehingga pembaca menjadi lebih ingin mengetahui lebih lanjut.
   (b) Memunculkan minat baca
   (c) Singkat dan jelas mendeskripsikan suatu masalah beserta solusinya.
   (d) Ringkasan Eksekutif, memaparkan beberapa hal berikut;
   (e) Faktor-faktor yang menjadi akar masalahnya,
   (f) Mengapa masalah tersebut perlu/strategis
   (g) Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut
   (h) Siapa yang menjadi subyek dalam menyelesaikan masalah tersebut

b. Pendahuluan
   (a) Terdiri dari beberapa kalimat ringkas akan tetapi menarik minat untuk membaca keseluruhan
   (b) Memuat topik yang akan dibahas
   (c) Menyebutkan penting topik tersebut
c. Deskripsi Masalah
   (a) Spesifik langsung ke inti permasalahan
   (b) Terukur/*evidence based* disertai bukti-bukti yang memadai
   (c) Analis (apa, dimana, siapa, mengapa terjadi, dampak/efek)
d. Rekomendasi
   (a) Spesifik memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat
   (b) Terukur, dalam arti solusi yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan *stakeholders* serta didukung oleh faktor-faktor yang ada
   (c) Alternatif (disertai analisis singkat, metode penentuan/pemilihan dan gambaran singkat alternatif yang dipilih)
e. Apendiksi (jika diperlukan)
f. Daftar Pustaka (referensi utama)

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait implementasi kebijakan pencegahan penggunaan rokok pada remaja di Kota Makassar yang akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Makassar. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teori model implementasi Van Meter dan Van Horn, berikut kerangka pikir yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

Gambar 5
Kerangka Berpikir dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber: Diolah oleh peneliti dari Van Meter dan Van horn

Penjelasan variabel model implementasi Van Meter dan Van Horn, sebagai berikut:

1) Standar dan tujuan kebijakan

   Indikator keberhasilan dan tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pelaksana kebijakan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan sehingga menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

2) Sumber daya kebijakan

   Sumber daya pendukung pelaksana kebijakan dapat berupa dana, materi, manusia dan insentif dari berbagai sumber yang bisa melancarkan pelaksanaan kebijakan.

3) Komunikasi antar organisasi

   Terdapat faktor pendukung yaitu komunikasi antar organisasi dan aktivitas-aktivitas penguatan dari berbagai pihak tentang apa yang menjadi standar dan tujuan dari kebijakan.

4) Karakteristik agen pelaksana

   Karakteristik agen pelaksana terdiri dari organisasi formal dan informal yang berkaitan dengan pengimplementasian kebijakan. Hal tersebut dilihat dari ciri pelaksana kebijakan yang menjalankan kebijakan dengan ketat dan disiplin.

5) Sikap para pelaksana

   Faktor ini adalah tahap pemilihan kebijakan dari para implementor, dengan memperhatikan tiga elemen yaitu; pengetahuan *(cognition)*, pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, respon kebijakan yang menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan intensitas pada kebijakan.

6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah faktor pendukung yang perlu diperhatikan karena kelompok sasaran dari suatu kebijakan berkaitan dengan kondisi sosial. Begitu juga dengan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, baik pada formulasi kebijakan sampai dengan implementasi kebijakan

D. Penelitian Terdahulu

1) Penelitian yang dilakukan oleh Fikri et al. 2024 tentang Determinan Perilaku Merokok pada Remaja Sekolah di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian Kuantitatif, menggunakan analisis regresi logistik biner dari data GYTS 2023. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Lingkungan pertemanan berkontribusi terhadap peningkatan risiko remaja menjadi perokok dan akses rokok yang masih mudah menjadi penyebab kuat kebiasaan merokok pada remaja. Penelitian ini hanya mengidentifikasi perilaku merokok dan tidak membahas atau menguji implementasi kebijakan yang berlaku
2) Penelitian yang dilakukan oleh Putri Prabawati and Nurhidayah 2024 tentang Problematika Rokok di Indonesia: Pemetaan Masalah dan Prediksi Kebijakan Pengendalian Konsumsi Rokok Kalangan Remaja dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Penelitian ini membahas terkait peningkatan jumlah perokok usia 13-15 tahun akibat kemudahan akses rokok dan kebijakan pemerintah yang belum efektif. Memberikan pemetaan masalah kebijakan tanpa mengevaluasi peran pelaksana kebijakan seperti dinas kesehatan, sekolah, atau puskesmas.

3) Penelitian yang dilakukan oleh Yassin et al. 2024 tentang *Threat Perception* dalam *Health Belief Models* (HBM) sebagai Prediktor Perilaku Merokok Masyarakat Kota Makassar dengan menggunakan metode penelitian Kuantitatif, dengan analisis regresi linear berganda. Jumlah responden: 611 perokok usia ≥15 tahun di Kota Makassar. Penelitian ini membahas seseorang memiliki persepsi bahwa merokok itu berbahaya, hal itu belum tentu menurunkan perilaku merokok karena masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti niat, lingkungan sosial, dan tekanan psikologis. Namun, penelitian tersebut tidak membahas bagaimana kebijakan pemerintah berjalan di lapangan atau bagaimana peran instansi kesehatan dalam mengubah perilaku masyarakat.